

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adjie, Habieb, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, , UII Press, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fatahna, Muchlis dan Joko Purwanto, 2003, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Watampone Press, Jakarta.
- Kanter E.Y, 2001, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Storia Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies Of Bussiness Law (CDBSL), Yogyakarta.
- Notodisoeryo, R. Sugondo, 1993, *Hukum Notariat di Indoenesia : Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Nuh, Muhammad, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Pusaka Setia, Bandung.
- Nusyirwan, 2000, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung.

O., Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Gunung Mulia, Jakarta.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Prastowo, Sidharta Pohan, 2002, *Standar Disiplin Profesi Hukum*, Legal Research Institut, Bandung.

Raharjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Salim, Peter dan Yeni, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Liberty, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Subekti, 1977, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta.

-----, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, CV. Aneka Ilmu, Semarang.

Tunggal, Hadi Setia, 2006, *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jabatan Notaris dilengkapi dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi dan AD, ART, dan Kode Etik Notaris*, Harvindo, Jakarta.

YLBHI dan PSHK, 2006, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Sentralisme Production, Jakarta Pusat.

Hasil Penelitian:

Gautama, Primanda Furry, "Implementasi Sanksi Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan Daerah Di Kabupaten Sleman", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Permatasari, Mahdiati Fauziah, "Peranan Dewan Kehormatan Daerah Dan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Bantul", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

Peraturan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia dan Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Bandung, 27 Januari 2005 dan Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia hasil rapat pleno pengurus pusat yang diperluas, Banten 30 Mei 2015.